

KETOKOHAN MOHAMMAD HATTA DALAM PERSPEKTIF HISTORI-POLITIK

Febi Agustina¹, Kustomo²

^{1,2}STKIP PGRI JOMBANG

¹febiagustien@gmail.com; ²stkipjkbkustomo@gmail.com

Abstract

The leadership of a country determines success in achieving the ideals and goals of the nation. Leadership is the art of controlling one's actions to achieve a mutually agreed goal. The lack of good leadership is a problem for the nation and the state. The number of cases of law violations in the form of dishonesty and indiscipline of leaders indicates that the Indonesian nation is in a leadership crisis. Therefore, a character is needed as a solution. This figure is Mohammad Hatta. The current leaders need to emulate Mohammad Hatta's attitude, especially in the field of politics. The research method used is literature with an advanced stage in the form of analysis and generalization of data conclusions. This study aims to: (1) analyze politics as the art of managing government in the figure of Bung Hatta, and (2) analyze politics as a conflict in the figure of Bung Hatta. Furthermore, the results obtained from this research are: (1) Politics as the art of managing the government in the figure of Bung Hatta is related to the authority of Bung Hatta which is always aimed at the independence of the nation and the prosperity of the people, and (2) Politics as a conflict in the figure of Bung Hatta aimed at maintaining the integrity of the Indonesian nation and making it a democratic nation.

Keywords: *Mohammad Hatta, Leader, Politics.*

Abstrak

Kepemimpinan suatu negara menentukan keberhasilan dalam menggapai cita-cita dan tujuan bangsa. Kepemimpinan merupakan seni untuk mengendalikan tindakan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang disetujui bersama. Ketidakberlangsungan kepemimpinan yang baik menjadi masalah bagi bangsa dan negara. Banyaknya kasus-kasus pelanggaran hukum baik berupa ketidakjujuran maupun ketidakdisiplinan para pemimpin menandakan bangsa Indonesia dalam keadaan krisis kepemimpinan. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok tokoh sebagai suatu solusi. Sosok tokoh tersebut adalah Mohammad Hatta. Para pemimpin saat ini perlu meneladani sikap Mohammad Hatta terlebih dibidang politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dengan tahap lanjutan berupa analisis dan penyimpulan data secara generalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis politik sebagai seni mengelola pemerintahan pada sosok Bung Hatta; dan (2) Menganalisis politik sebagai konflik pada sosok Bung Hatta. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Politik sebagai seni mengelola pemerintahan pada sosok Bung Hatta kaitannya dengan kewenangan Bung Hatta yang selalu ditujukan untuk kemerdekaan bangsa dan kemakmuran masyarakat; dan (2) Politik sebagai konflik pada sosok Bung Hatta ditujukan untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia dan menjadikannya sebagai bangsa yang demokratis.

Kata kunci: *Mohammad Hatta, Pemimpin, Politik.*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan adalah keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar tercapainya tujuan bersama. Menurut Siagian (dalam Hutahean, 2021: 2), kepemimpinan merupakan suatu keterampilan dan kemauan seseorang yang menjabat sebagai pemimpin dalam suatu pekerjaan yang mempengaruhi perilaku orang lain agar berpikir dan bertindak laku sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Setiap kepemimpinan memiliki kekurangan dan kelebihan yang ditandai dengan kepuasan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan tindakannya jauh dari kecurangan atau melanggar hukum maupun etika kepemimpinan. Pemimpin yang baik mampu membawa perubahan negara menjadi lebih maju dan berkembang. Oleh karena itu, masa kepemimpinan tersebut mampu menciptakan kepuasan dalam masyarakat.

Ketidakberlanjutan kepemimpinan yang baik menjadi masalah utama bagi bangsa dan negara. Ketidakberlanjutan tersebut ditandai dengan merosotnya moral dalam diri pemimpin yang cenderung bertindak pada pelanggaran hukum. Dampak dari hal tersebut salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Seperti pada kasus-kasus yang banyak melibatkan petinggi atau pejabat pemerintahan negara Indonesia. Ketidaksiplinan hingga ketidakjujuran adalah sikap yang banyak dimiliki oleh pemimpin saat ini. Politik mereka gunakan sebagai ajang untuk mempermudah hingga memperkaya diri sendiri ataupun golongannya. Sikap seperti itu, membuat para pemimpin lupa terhadap tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan.

Krisis kepemimpinan seperti halnya di atas, harus segera ditangani yaitu dengan cara meneladani tokoh melalui rekam jejak kepemimpinan di masanya. Tokoh yang patut untuk diteladani saat ini salah satunya adalah Mohammad Hatta atau lebih dikenal dengan Bung Hatta. Bung Hatta lebih dikenal sebagai bapak proklamator kemerdekaan Indonesia atau bapak koperasi Indonesia. Kiprahnya di bidang politik mampu memberikan jalan bagi bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Politik bagi Bung Hatta dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Berbeda dengan zaman sekarang yang mana politik lebih diarahkan untuk mencapai tujuan pribadi atau golongan dengan mengesampingkan kepentingan rakyat.

Pada tahun 192, Bung Hatta diangkat Wakil Presiden pertama di RI melalui peran Otto Iskandar Dinata secara aklamasi. Dipilihnya Bung Hatta sebagai Wakil Presiden RI karena kedekatannya dengan Pemerintah Jepang. Kedekatan tersebut diharapkan mampu menjadi mediator dengan pihak Jepang. Selain itu, tindakan yang paling mengesankan adalah dikeluarkannya Maklumat X dan Maklumat Pemerintahan untuk menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang demokratis (Alfarizi, 2020: 166). Oleh karena itu, politik oleh Bung Hatta yang dijalankan berdasarkan nasionalisme, mampu membuanya dihormati hingga disegani oleh masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fathoni, dkk (2021) dengan judul penelitian “Nilai Karakter Kepedulian Sosial Tokoh Mohammad Hatta” menunjukkan bahwa Mohammad Hatta memiliki sikap kepedulian diantaranya tolong-menolong, mengutamakan kepentingan, dan toleransi.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Luvi Febri Suwarsa, (2018) dengan judul “Pemikiran Politik Mohammad Hatta Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat” menunjukkan hasil bahwa demokrasi di Indonesia Ini berbeda dengan Demokrasi Barat. Hatta mengutarakan ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita, diantaranya: (1) Sosialisme Barat; (2) Ajaran Agama; (3) pemahaman bahwa masyarakat Indonesia berdasarkan Kolektivisme; (4) Kedaulatan Rakyat menurut Hatta harus berada ditangan rakyat. Relevansi Pemikiran Mohammad Hatta di era demokrasi digital di negara Indonesia sudah sedikit berpandangan sosialis dengan mengedepankan prinsip dasar-dasar kemanusiaan, namun dalam kenyataannya demokrasi di era digital ini masih carut-marut.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: (1) Menganalisis politik sebagai seni mengelola pemerintahan pada sosok Bung Hatta; dan (2) Menganalisis politik sebagai konflik pada sosok Bung Hatta. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai upaya menciptakan pemimpin yang tidak belaku sewenang-wenang dengan kekuasaan yang dimilikinya melalui ketokohan Mohammad Hatta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang disusun oleh peneliti untuk mendapatkan data yang tepat dan dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang akan dipecahkan. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kepustakaan atau *library research*. Sumber data primer peneliti berupa buku terkiat dengan biografi Mohammad Hatta, sedangkan sumber data sekunder berupa artikel, jurnal, makalah, dan sejenisnya. Prosedur penelitian dilakukan dengan: (1) Pemilihan topik; (2) Eksplorasi informasi; (3) Menentukan rumusan permasalahan; (4) Pengumpulan sumber data; (5) Persiapan penyajian; dan (6) Penyusunan laporan.

Penelitian kepustakaan ini menggunakan pendekatan riset biografi dan pendekatan ilmu politik. Studi ini menitikberatkan pada sejarah dan politik kehidupan seseorang yang ditulis oleh peneliti lain (Hamzah, 2021: 31). Penelitian kepustakaan termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Sehingga dalam menganalisis kajian ini sama dengan menganalisis data penelitian kualitatif. Analisis kajian ini meliputi: (1) Reduksi data yaitu memilih data sesuai dengan tema untuk diolah dan dicari yang sesuai; (2) Penyajian data, disajikan dalam bentuk naratif; dan (3) Verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

A. Politik sebagai Seni Mengelola Pemerintahan

Di awal menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta membuat tiga keputusan penting, diantaranya Hatta memberikan kekuatan legislatif KNIP sebagai tambahan untuk peran penasihatnya kepada presiden, mengesahkan pembentukan partai politik di Indonesia, dan pengambilan peran presiden sebagai kepala pemerintahan dan mengalihkannya ke perdana menteri. Bung Hatta dapat membuat keputusan penting karena Bung Karno tidak dapat menghadiri pertemuan dan sebagai gantinya Bung Hatta yang berkuasa dalam memimpin pertemuan tersebut (Muhibudin, 2019: 147).

Bung Hatta merupakan penentang individualisme di bidang ekonomi selama kurang lebih 20 tahun. Penentangannya terhadap individualisme ekonomi ini, lebih didorong pada pembelaannya terhadap sosialisme dan koperasi. Namun, Bung Hatta tidak setuju jika hak-hak asasi dan kebebasan warga negara tidak dimasukkan ke dalam konstitusi. Sebab, perlunya hak asasi dimasukkan ke dalam konstitusi supaya kebebasan warga negara mempunyai jaminan dan landasan yang kuat. Bung Hatta berpandangan bahwa, jika kebebasan berbicara tidak dijamin dalam konstitusi, ada kemungkinan Indonesia akan lahir sebagai negara diktator dan otoriter. Dengan pertimbangan tersebut, Bung Hatta menuntut supaya di dalam konstitusi, juga dimasukkan pasal-pasal yang menjamin kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul warga negara termasuk kebebasan rakyat untuk menyelenggarakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan umum secara bebas

Ekonomi kerakyatan yang dicetuskan oleh Bung Hatta atau dikenal sebagai koperasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Hatta dalam kiprahnya sebagai pejabat negara selalu menekankan pentingnya demokrasi ekonomi kerakyatan berbasis pada koperasi, pendidikan politik, dan politik luar negeri bebas aktif. Pidato yang disampaikan oleh Bung Hatta pada Konferensi Ekonomi Indonesia di Yogyakarta pada 1946, mencerminkan cita-cita para pendiri kemerdekaan RI. Pidato yang disampaikan oleh Bung Hatta sebagai wakil presiden merupakan penafsiran asli dari pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara yuridis-historis (Alfarizi, 2020: 120).

B. Politik sebagai Sarana Manajemen Konflik

Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia yang terbentuk melalui perundingan, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, muncul ketidaksetujuan terhadap sila pertama Pancasila yang diusulkan oleh Panitia Sembilan. Bunyi dari sila pertama tersebut adalah “....dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ketidaksetujuan tersebut muncul dari golongan umat kristiani dan katolik. Kedua golongan tersebut menginginkan agar tidak disahkannya sila pertama tersebut.

Hadikusumo adalah salah seorang tokoh yang tidak setuju apabila kalimat tersebut diganti. Tokoh beraliran Muhammadiyah ini kemudian ditemui oleh Bung Hatta dan Hasan untuk menjelaskan keadaan darurat yang dialami bangsa Indonesia setelah kemerdekaan. Akan terjadi perpecahan dan golongan Kristen akan membuat negara sendiri yang kemudian akan dibantu oleh Belanda, apabila Ki Bagus Hadikusumo tidak menerima penjelasan dari Bung Hatta serta usulan baru untuk sila pertama Pancasila. Akhirnya Ki Bagus Hadikusumo menerima permintaan Bung Hatta dan Hasan. Sila pertama dalam Piagam Jakarta yang sudah menjadi permasalahan selama sidang BPUPKI akhirnya terselesaikan dan sila pertama digantikan dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Alfarizi, 2020: 148-149)

Pada 16 Oktober 1945, dikeluarkan dan disahkannya Maklumat Wakil Presiden No. X yaitu keputusan politik bersifat sangat penting untuk menegakkan demokrasi. Dalam maklumat tersebut, Bung Hatta menulis

seperti berikut: "Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih diantara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat."

Penjelasan terhadap maklumat ini yang dikeluarkan pada 20 Oktober 1945 merupakan konsep parlementarian. Dalam arti kata, maklumat ini menjadi landasan baru terbentuknya *check and balances* kekuasaan. Sehingga, perspektif Bung Hatta tentang partai begitu jelas yaitu tujuan mempertahankan kemerdekaan, parpol merupakan tempat terhimpunnya beragam potensi dan kecerdasan politik pada diri anak-anak bangsa untuk serta atas nama Indonesia, bekerja menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam konteks pengelolaan negara. Oleh karena itu, partai adalah sumber ide bagi pengelolaan negara dan dalam kedudukannya sebagai penjamin keamanan masyarakat, partai dalam gagasan Bung Hatta merupakan representasi pada tataran politik formal terhadap kehendak dan aspirasi logis masyarakat warga (*civil society*). Oleh karena itu, selain dikeluarkannya Maklumat X, juga dikeluarkan Maklumat Pemerintah pada 13 November 1945 (Alfarizi, 2020: 166-167).

Peristiwa lainnya adalah testamen untuk Malaka. Kiprah Hatta adalah bagaimana gigihnya dia menangkis serangan Tan Malaka. Konflik antara Tan Malaka dan Hatta terutama meningkat saat pendudukan Jepang. Ia menuduh Soekarno-Hatta berkolaborasi dengan Jepang. Situasi itu mendorong Soekarno bertemu dengan Tan Malaka, Iwa Koesoemasoemantri, dan Gator Taroenamihardjo, di rumah Ahmad Socbardio, Iwa dan Gatot saat itu Menteri Kesehatan dan Jaksa Agung. Pada 30 September, mereka sepakat menunjuk Tan sebagai ahli waris revolusi bila terjadi sesuatu pada Soekarno-Hatta. Kemudian Soekarno pergi ke rumah Hatta. Setelah menceritakan pertemuan itu, Hatta memberikan jawaban: "Kenapa tidak bicara dulu kepada saya? Engkau mestinya kenal baik siapa itu Tan Malaka." (Alfarizi, 2020: 156)

Hatta menolak hasil pertemuan dan mengusulkan jalan keluar dari revolusi akan diteruskan kepada pemimpin dari empat kutub. Tan Malaka mewakili aliran paling kiri, Sutan Sjahrir dari kelompok kiri-tengah, Wongsonegoro wakil kalangan kanan dan feodal, serta Soekiman representasi kelompok Islam. Soekarno puas dengan jalan tengah ini. Ia menelepon Soebardjo mengajak bertemu. Soehardjo, bersama Tan dan Iwa, menyambut Soekarno Hatta besoknya. Di rumah Soebardjo, Hatta memaparkan pendapatnya. Ia mengatakan bahwa keberadaan Tan di kalangan kiri bisa menyulut kontroversi, karena Partai Komunis Indonesia tidak menyukainya. Hatta juga mengusulkan agar Tan melakukan perjalanan keliling Jawa. Selain memperkenalkan diri pada rakyat, juga untuk mengukur seberapa besar pengaruhnya. (Alfarizi, 2020: 156-157)

PEMBAHASAN

A. Politik sebagai Seni Mengelola Pemerintahan

Seni mengelola pemerintahan merupakan pengelolaan kontrol di dalam masyarakat melalui pembuatan dan penegakan keputusan kolektif yang biasanya disebut dengan kebijakan (Dermawan, 2015: 13). Seni mengelola pemerintahan yang dilakukan oleh Bung Hatta diwujudkan melalui pemikiran-pemikiran yang ia cetuskan untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat, baik ketika ia sebelum maupun ketika ia menjabat sebagai wakil presiden Indonesia.

Bung Hatta selaku Wakil Presiden waktu itu mampu mengambil tindakan atau keputusan meskipun tanpa adanya Bung Karno. Keputusan tersebut diambil agar demokrasi di Indonesia tetap terjaga. Keputusan-keputusan tersebut dapat membatasi kekuasaan presiden maupun wakil presiden dalam menentukan langkah pergerakan. Sehingga tidak akan menimbulkan negara dipimpin oleh pemimpin yang otoriter dan diktator. Hal tersebut sebagaimana prinsipnya bahwa ia menolak demokrasi yang mengutamakan individualisme, karena dalam perkembangannya, hanya kaum yang memiliki modal adalah pihak yang paling cepat memanfaatkan keadaan tersebut. Sehingga akan muncul dominansi kaum kapitalis dan mampu membuka lebar *l'exploitation de l'homme par l'homme* yaitu eksploitasi manusia atas manusia (Alfarizi, 2020: 106).

Pembuatan dan penegakan keputusan secara kolektif sebagai kontrol masyarakat adalah disahkannya Pasal 28 dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 berisikan tentang keputusan kebebasan berbicara, berserikat dan berkumpul warga negara termasuk kebebasan rakyat untuk menyelenggarakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan umum secara bebas. Awalnya pengesahan pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 oleh BPUPKI tidak disetujui oleh Bung Karno karena menurutnya pencantuman HAM bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang harus diabadikan (Muhibudin, 2019: 122). Akan tetapi berlalinalah dengan Bung Hatta yang mengedepankan Hak Asasi Manusia memberikan sanggahan kritis, bahwa apabila HAM tidak dimasukkan dalam konstitusi, maka yang akan terjadi adalah ketidakberdayaan masyarakat dan pemerintah menjadi negara yang otoriter serta diktator.

Sama halnya dengan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tentang ekonomi kerakyatan atau biasa disebut dengan koperasi. Latar belakang dari disahkan pasal tersebut adalah keinginan terjaminnya kehidupan perekonomian masyarakat. Dalam pasal ini, kemakmuran masyarakat diutamakan. Bung Hatta dalam kiprahnya sebagai negarawan selalu menekankan pentingnya demokrasi ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Hal ini dikarenakan ia memiliki karakter, visi dan komitmen untuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keinginan terpenuhinya hajat hidup masyarakat, diperlukannya kebijakan seperti halnya perjuangan Bung Hatta menjadikannya sah dalam konstitusi agar perekonomian negara tidak dikuasai oleh segelintir orang tanpa bekerja.

B. Politik sebagai Sarana Menejemen Konflik

Konflik selalu berkaitan dengan kekuasaan, dan kekuasaan merupakan sumber daya yang bersifat terbatas, sedangkan yang menginginkan kekuasaan jumlahnya tidak terbatas, maka politik tidak akan lepas dengan konflik. Menurut Austin Ranney dalam (Darmawan, 2015: 17), politik adalah proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan konflik karena di dalam proses tersebut kebijakan terdapat usaha untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan masing-masing yang sering kali berbeda-beda satu sama lain.

Bung Hatta adalah seorang nasionalis meskipun ia lahir dari keluarga dengan lingkungan keagamaan yang begitu kental. Ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan yang menyangkut persatuan, seperti pada peristiwa “Piagam Jakarta”. Permasalahan yang muncul mampu berdampak pada perpecahan bangsa Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaan. Tepatnya pada 18 Agustus 1945. Disahkannya kalimat “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dalam Piagam Jakarta sebagai rancangan sila pertama Pancasila, membuat adanya rasa keberatan bagi masyarakat yang beragama non Islam, terutama Kristen. Bung Hatta berpendapat bahwa jika tidak segera diubah, maka akan terjadi perpecahan dan umat kristen akan melepaskan diri dari Republik.

Hadikusumo yang teguh dengan kalimat tersebut, bisa berubah haluan setelah mendengar penjelasan Bung Hatta. Bung Hatta tidak melakukannya sendiri karena merasa sebagai nasionalis, ia tidak mampu meyakinkan Hadikusumo sendirian. Ia dibantu oleh Hasan sebagai penengah dalam perbincangan. Setelah Ki Bagus Hadikusumo menerima permintaan Bung Hatta dan para tokoh lainnya, maka ditetapkan sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa”. Hal ini dilakukan sebagai perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Konflik dalam negeri ini merupakan ancaman yang sangat serius. Sebab perpecahan dapat terjadi apabila negara tidak mampu menyatukan perbedaan yang dimiliki oleh masyarakatnya.

Selain dalam peristiwa piagam Jakarta, politik sebagai konflik juga terdapat dalam peristiwa Maklumat X yang dikeluarkan oleh Bung Hatta pada 16 Oktober 1945. Disahnya Maklumat X oleh Bung Hatta merupakan awal ditegakkannya Demokrasi Parleментар. Selain itu, juga terdapat Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945. Tujuan dikeluarkannya Maklumat X oleh Bung Hatta adalah untuk menegakkan demokrasi sedangkan Maklumat Pemerintah adalah memberikan pengakuan terhadap arti pentingnya partai politik dan menempatkan pemerintah dalam posisi proaktif ke arah pembentukan partai politik. Parlemen dan partai politik saling berhubungan satu sama lain. Partai politik merupakan pilar pendukung eksistensi parlemen. Absurd jika partai bekerja tanpa memiliki kaitan logis dengan upaya “okupasi” kekuasaan legislatif di parlemen. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Partai politik merupakan tempat bagi tumbuhnya potensi maupun kecerdasan politik pada diri anak bangsa dan

mampu menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam konteks manajemen kenegaraan (Alfarzi: 2020: 165-170).

Sebagaimana halnya kasus Tan Malaka. Penyerahan ahli waris revolusi oleh empat tokoh, termasuk salah satunya adalah Bung Karno, merupakan tindakan yang mencederai demokrasi. Sehingga ketika perihal tersebut diketahui oleh Bung Hatta, ia menolak persetujuan atas Tan Malaka yang dijadikan sebagai ahli waris revolusi Indonesia. Hak politik bangsa Indonesia yang merupakan negara demokrasi, harus berada di tangan rakyat. Sebagai solusinya, Bung Hatta menyampaikan pendapatnya agar Tan Malaka melakukan perjalanan keliling Jawa untuk memperkenalkan diri dan mengukur seberapa besar pengaruhnya di masyarakat.

Polemik ahli waris tersebut sudah mencuat di media massa pada 1972 yang merupakan taktik Tan Malaka untuk merebut kekuasaan. Dengan memutuskan agar Tan melakukan perjalanan ke Jawa, dan hasilnya adalah ia hendak ditangkap beberapa kali dalam perjalanannya. Apabila dalam testamen Tan Malaka telah disetujui oleh kedua tokoh proklamator Indonesia, kekuasaan akan beralih ke Tan Malaka dan demokrasi yang anut bangsa Indonesia telah redup. Kepentingan rakyat akan dikesampingkan oleh ego pribadi pemimpin. Demokrasi yang diimpikan adalah segala sesuatu berada di tangan rakyat sehingga rakyat juga ikut serta menentukan nasib bangsa Indonesia.

Tindakan Bung Hatta selalu tidak lepas dari keyakinan dan keinginannya untuk menegakkan demokrasi terhadap bangsa Indonesia. Adanya demokrasi, mampu membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, dengan demokrasi menjadikan bangsa Indonesia bukan menjadi negara dengan pemimpin yang otoriter dan diktator dengan mengesampingkan kepentingan masyarakatnya. Hal ini hubungannya dengan Bung Hatta dengan penegakan pasal yang ia usahakan agar tercantum dalam konstitusi, yaitu Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 mengenai adanya jaminan hak untuk berpendapat, dan seterusnya terhadap masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

- A. Politik sebagai seni mengelola pemerintahan merupakan manajemen masyarakat melalui pembuatan dan penegakan kebijakan yang diambil dari keputusan secara kolektif. Kaitannya dengan kewenangan Bung Hatta sebagai bendahara dalam berorganisasi di *Indonesische Vereeniging* atau dikenal dengan Perhimpunan Indonesia dan perjuangannya memasukkan Pasal 28 dan Pasal 33 ke dalam konstitusi sebagai penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia.
- B. Politik sebagai sarana manajemen konflik berkaitan dengan kekuasaan yang memiliki sifat yang terbatas dengan keinginan yang tidak terbatas sehingga mampu menimbulkan konflik. Politik dapat dikatakan sebagai pembuatan kebijakan untuk mengatasi konflik yang terjadi. Dalam hal ini, Bung Hatta sebagai *founding fathers* dan Wakil Presiden RI, tetap mengutamakan

kepentingan bersama. dalam menghadapi setiap konflik yang timbul sehingga Indonesia tetap sebagai negara yang menganut paham demokratis.

SARAN

A. Bagi Peneliti Lain

1. Dapat dijadikan acuan atau referensi tambahan dalam penelitian berikutnya.
2. Dapat memperbaharui penelitian ini apabila ditemukan bukti-bukti baru.

B. Bagi Pemerintah dan Organisasi Pergerakan

1. Mampu menggunakan kewenangan yang diberikan sebagaimana mestinya. Sehingga tidak akan menimbulkan kesewenangan yang merugikan banyak orang.
2. Menjadikan Bung Hatta sebagai tokoh teladan untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam mengatur dan mengelola jalannya pemerintahan dan/atau organisasi.
3. Menggunakan politik sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dan/atau anggota organisasi.

C. Bagi Pendidik

1. Menanamkan karakter dan sikap kepemimpinan yang baik dalam diri peserta didik dengan meneladani sosok Mohammad Hatta.
2. Menjadikan Bung Hatta sebagai tokoh yang patut untuk diteladani agar mampu menciptakan generasi pemimpin yang dapat memajukan serta mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfarizi, Salman. (2020). *Mohammad Hatta: Biografi Singkat (1902-1980)*. Yogyakarta: Garasi.
- [2] Dermawan, Ikhsan. (2015). *Mengenal Ilmu Politik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- [3] Fathoni, Ahmad., dkk. (2021). *Nilai Karakter Kepedulian Sosial Tokoh Mohammad Hatta*. *Jurnal Sejarah & Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi*, (Online), 1(1): 44-58, (<https://Online-journal.unja.ac.id/jejak/article/download/13273/>), diunduh pada 28 Maret 2022.
- [4] Hamzah, Amir. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- [5] Hatta, Mohammad. (1982). *Mohammad Hatta Memoir*. Jakarta: Tintamas Indonesia.
- [6] Hutahean, Wendy S., dan Yayuk Umayana (ed). (2021). *Pengantar Kepemimpinan*. Malang: Ahlimedia Press. Dari Z-Library, (Online), (<https://en.id1lib.org/book/18521453/c64d5>), diunduh pada 18 April 2022.
- [7] Maharani, Tsarina., dan Krisiandi (ed). (2020). *2 Menteri Tersangka Korupsi, Presiden Diminta Segera Resuffle Kabinet*. (Online), (<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08/15204641/2-menteri-tersangka-korupsi-presiden-diminta-segera-resuffle-kabinet>), diakses pada 17 Mei 2022.

- [8] Muhibbudin, Muhammad. (2019). *Bung Hatta: Kisah Hidup dan Pemikiran Sang Arsitek Kemerdekaan*. Yogyakarta: Araska.
- [9] Suwarsa, Luvi Febri. (2018). *Pemikiran Politik Mohammad Hatta Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi. (Online), (<http://repositori.unsil.ac.id/1057/>) diunduh pada 28 Maret 2022.